Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Reformasi yang telah diperjuangkan oleh seluruh lapisan masyarakat telah membawa perubahan dalam kehidupan politik nasional maupun di setiap daerah yang ada direpublik Indonesia.

Salah satu agenda reformasi tersebut adalah dengan adanya otonomi daerah. Berdasarkan ketetapan MPR nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, pemerintah telah mengeluarkan satu paket kebijakan otonomi daerah yaitu: Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang PemerintahanDdaerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Kedua Undang-undang tersebut menjadi sangat penting karena membawa perubahan yang mendasar pada kehidupan sistem pemerintahan dan sistem keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Dalam era otonomi daerah yang telah dilaksanakan sejak tahun 2001, sejak saat itu terjadi perubahan dalam perumusan strategi dan perencanaan strategik, misalnya dengan membuat propenas, renstra dan raperta baru, selanjutnya dijabarkan dalam bentuk propeda, renstrada dan repetada. Perubahan-perubahan lain juga terjadi, diantaranya perubahan sistem penganggaran, misalnya dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan anggaran kinerja dengan struktur baru dan berbeda dengan struktur APBD periode sebelumnya. Kebijakan pemerintah daerah masih tetap berdasarkan arahan kebijakan pembangunan pemerintah pusat yang tertuang dalam dokumen perencanaan GBHN, Program Pembangun Nasional (PROPENAS), Rencana Strategis (RENSTRA), dan Rencana Pembangunan Tahunan (RAPETADA).

Dalam pemerintahan daerah dibutuhkan penyusunan anggaran yang digunakan sebagai rancangan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk alokasi dana operasional atau program-program pelayanan masyarakat dan aktivitas yang dibutuhkan oleh suatu daerah. Penyusunan anggaran dilaksanakan oleh beberapa tim penyusun anggaran dan dibantu oleh Unit Organisasi Perangkat Daerah (unit kerja), Satuan Kerja Perangkat Daerah biasa di singkat SKPD adalah perangkat pemerintah daerah di Indonesia. SKPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintah berjalan dengan baik. Dasar hukum yang berlaku sejak tahunn 2004 untuk pembentukan SKPD adalah Pasal 120 UU no. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Gubernur dan wakilnya, bupati dan wakilnya, atau walikota dan wakilnya tidak termasuk ke dalam satuan ini, karena berstatus sebagai kepala daerah. Ke dalam SKPD termasuk secretariat daerah, staf-staf ahli, secretariat DPRD, Dinas-dinas, Badan-badan, Inspektorat Daerah, lembaga-lembaga daerah lain yang bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah, kecamatan-kecamatan (atau satuan lainnya yang setingkat), dan kelurahan/desa (atau satuan lainnya yang setingkat)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Adanya anggaran di pemerintah daerah memungkinkan pemerintah untuk melakukan fungsi pengendalian atas aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh beberapa daerah.

Perencanaan Arahan Kebijakan Pembangunan Daerah(RAPETADA) dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan publik sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Proses penganggaran pemerinah daerah dimulai ketika perumusan strategis (PROPEDA) dan perencanaan strategis(renstra dan rapetada) telah selesai dibuat. Oleh sebab itu ketiga hal diatas sangat penting, karena jika ketiga hal ini tidak dapat dilakukan maka akan menggagalkan perencanaan yang telah disusun.

Kemudian APBD menurut Permendagri No.13 Tahun 2006 adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, yang di tetapkan dengan peraturan daerah.

Di era otonomi daerah saat ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar agar bisa mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.Tujuannya agar pelayanan masyarakat tersalurkan dengan baik dan terjadi pendekatan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan seluruh masyarakat agar bisa memantau sendiri dan mengontrol penggunaan dan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Selain itu juga akan menciptakan persaingan yang sehat antara daerah dan mendorong timbulnya berbagai inovasi disetiap daerah. Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerah melalui PAD.

Anggaran merupakan suatu alat perencanaan yang dibuat dalam bentuk keuangan, Anggaran berisi aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan selama periode waktu tertentu sebagai acuan kegiatan pemerintah dan menunjukkan tujuan kegiatan operasi. Pemahaman terhadap tujuan anggaran dan informasi tentang seberapa banyak tujuan anggaran memberi dasar bagi pembuat anggaran dalam mengukur efisiensi, mengidentifikasi masalah, dan dalam pengendalian biaya.

Anggaran merupakan alat penentuan bagi pemerintah dalam melakukan pengendalian, koordinasi, komunikasi, pengendalian kinerja, dan motivasi. Dimana fungsi anggaran itu antara lain adalah sebagai dasar pengukuran kinerja yang dapat mempengaruhi perilaku pihak penyusunan anggaran untuk tujuan anggaran itu sendiri.

Anggaran juga merupakan rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu (Indra Bastian, 2010). Anggaran merupakan sebuah rencana yang disusun dalam bentuk kuantitatif dalam satuan moneter untuk satu periode dan periode anggaran biasanya dalam jangka waktu setahun (Abdul Halim, 2007).

Penyusunan anggaran dalam sektor publik berbeda dengan penganggaran sektor swasta, pada sektor swasta anggaran merupakan suata hal atau bagian yang rahasia bagi perusahaan yang tertutup untuk publik, namun sebaliknya berbeda dengan sektor publik, karena pada sektor publik anggaran adalah sesuatu hal yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus transparan dan di informasikan kepada masyarakat disuatu daerah atau kepada publik, ini bertujuan agar anggaran tersebut bisa di kritik dan didiskusikan agar bisa mendapatkan masukan-masukan yang tepat. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dari uang publik atau daerah.

Anggaran pada sektor publik terkait dengan proses penuntuam jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktifitas dalam satuan moneter yang menggunakan dana milik rakyat, hal ini lah yang menjadi perbedaan antara anggaran swasta dan publik. Pada sektor publik pendanaan berasal dari pajak, retribusi, laba dan perusahaan milik daerah atau Negara, pinjaman pemerintah berupa utang luar negri dan obligasi pemerintah, serta sumber dana lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah di tetapkan.

Dalam partisipasi penyusunan anggaran sebagai proses dimana bawahan pelaksana anggaran diberikan kesempatan untuk terlibat dan mempunyai pengaruh dalam proses penyusunan anggaran. Kesempatan yang diberikan diyakini meningkatkan pengendalian dan rasa keterlibatan dikalangan bawahan atau pelaksana anggaran.Partisipasi penyusunan anggaran diperlukan agar anggaran yang dibuat bisa lebih sesuai dengan realita yang ada dilapangan.

Pemerintah daerah yang ikut berpartisipasi dalam proses penganggaran menuntut adanya komunikasi antara atasan dan bawahan untuk saling memberikan informasi karena bawahan lebih mengetahui kondisi langsung pada bagiannya. Partsipasi penyusunan anggaran merupakan pendekatan yang secara umum dapat meningkatkan kinerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

efektifitas organisasi (Nor:2007). Sedangkan Handoko (1998) dalam Nor(2007) menyatakan partisipasi sebagai alat untuk mencapai tujuan, partisipasi juga sebagai alat untuk mengintegrasi kebutuhan individu dan organisasi. Sehingga partisipasi dapat diartikan sebagai berbagai pengaruh, pendelegasian prosedur-prosedur, keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan surat pemberdayaan.

Partisipasi anggaran merupakan tingkat seberapa jauh keterlibatan dan pengaruh individu didalam menentukan dan menyusun anggaran yang ada dalam divisi atau sebagainya, baik secara periodik maupun tahunan. Untuk mencegah dampak fungsional dan disfungsional, maka dalam penyusunan anggaran di perlukan keterlibatan manajemen level bawah (Sardjito 2007)

Penganggaran partisipatif merupakan pendekatan penganggaran yang berfokus pada upaya untuk meningkatkan motivasi karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Konsep penganggaran ini sudah berkembang pesat dalam sektor bisnis, jauh meninggalkan pendekatan yang sama dalam sektor publik. Partisipasi anggaran akan berdampak negatif apabila tidak dikelola dengan baik, karena dapat berakibat timbulnya senjangan anggaran.

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana anggaran diterapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut (Kenis dalam I wayan 2016). Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan dari suatu pelaksanaan yang telah dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Ehrmann

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suhartono (2006) menunjukkan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh negatif signifikan terhadap senjangan anggaran.Sedangkan menurut Biantara (2014) mengenai pengaruh kejelasan sasaran anggaran berpengaruh berpengaruh secara positif pada senjagan anggaran.Indra Bastian (2010 : 192) mengatakan terdapat beberapa karakteristik dalam sistem anggaran publik. Salah satu karakteristik anggaran adalah kejelasan sasaran anggaran.Kejelasan sasaran anggaran tercakup dalam Rencana Strategik Daerah (Renstrada) dan Program Pembangunan Daerah (Propeda). Indra Bastian (2010) menyatakan adanya sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan individu untuk menyusun target-target anggaran. Target-target anggaran yang disusun akan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai organisasi. Penyusunan target-target anggaran akan berimplikasi pada penurunan senjangan anggaran.

Ketidakjelasan sasaran anggaran merupakan salah satu penyebab tidak efektif dan efesiennya anggaran yang mengakibatkan aparat pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam penyusunan target-target anggaran sehingga dapat menimbulkan kesenjangan anggaran. Penyusunan target-target anggaran merupakan kegiatan yang penting dan kompleks karena adanya kemungkinan akan timbulnya dampak fungsional dan disfungsional terhadap sikap dan perilaku anggota organisasi (Dedi, 2007).

Penyusunan anggaran dimulai dari proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan atas tugas dan fungsi pemerintah sehingga dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Penyusunan anggaran diawali oleh Kepala Daerah dibantu dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyusun rancangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebijakan Umum APBD. Rancangan Kebijakan Umum APBD memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan, disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Hasil rancangan KUA disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.

Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting dilingkungan pemerintah daerah. Anggaran akan berdampak terhadap akuntabilitas pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Mardiasmo (2009:61) mendefenisikan anggaran sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. DPRD akan mengawasi kinerja pemerintah melalui anggaran. Bentuk pengawasan ini sesuai dengan *agency theory* yang mana pemerintah sebagai *agent* dan DPRD sebagai *principal*.

Pemerintah menggunakan sistem anggaran berbasis kinerja yang merupakan proses pembangunan yang efesien dan partisipatif, serta menggunakan kinerja sebagai tolak ukur dalam pencapaian target anggaran daerah. Penilaian kinerja tersebut memotivasi agen untuk melakukan senjangan anggaran *(budgetary slack*) demi jenjang karir yang lebih baik dimasa mendatang (Suartana, 2010).*Budgetary slack* atau senjangan anggaran juga sering terjadi pada tahap perencanaan dan persiapan anggaran daerah, karena didominasi pada kepentingan eksekutif dan legislatif, serta kurang mencerminkan kebutuhan masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Kartiwa, 2004).*Budgetary slack*akan berdampak pada kesalahan alokasi sumber daya dan bias dalam evaluasi kinerja agen pada inti pertanggungjawabannya (Suartana, 2010).

Kemudian menurut Suartana (2010) menyatakan bahwa senjangan anggaran dapat diartikan sebagai perbedaan antara jumlah anggaran yang dinyatakan dan estimasi terbaik yang secara jujur diprediksikan. Senjangan anggaran terjadi dikarenakan manajer menetapkan pendapatan lebih rendah dan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan estimasi yang seharusnya menjadi target organisasi tersebut.

Fenomena yang terjadi diKota Batam, berdasarkan hasil wawancara bahwa bawahan berpartisipasi dalam penyusunan anggaran dan kemudian Kepala dinas pada tiap SKPD mengarahkan untuk menjalankan program yang telah disusun, dari program yang dijalankan itu terjadinya anggaran. Kemudian realisasi anggaran tersebut lah diukur kinerja dari pada tiap SKPD tersebut. Inilah yang menjadi timbulnya senjangan anggaran, dapat terlihat dari laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten Kota Batam, tahun 2014-2015 terjadinya senjangan anggaran dapat dilihat pada Tabel 1.1berikut :

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Anggaran Kota Batam (dalam ribuan)
Tahun 2014-2015

Uraian Pendapatan	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Asli Daerah	634.356.518.018	779.944.837.450	121.23
Pendapatan Transfer	1.009.589.144.303	969.923.629.800	96.08
Lain-lain yang sah	129.516.567.514	129.081.762.514	99.67

Uraian Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Operasi	1.553.617.983.917	1.474.852.584.845	94.93
Belanja Modal	609.589.417.300	492.747.683.751	80.83
Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	12.678.600	0.25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Uraian Pembiayaan	Anggaran	Realisasi	%
Penerimaan Pembiayaan	264.837.337.353	269.651.846.317	101.82
Pengeluaran Pembiayaan	45.668.371.350	56.901.322.724	124.60

TAHUN 2015

Uraian Pendapatan	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Asli Daerah	812.739.614.159	836.713.858.341	102.95
Pendapatan Transfer	1.289.203662.955	1.094.740.144.637	84.92
Lain-lain yang sah	3.000.000.000	4.952.804.600	165.09

Uraian Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Operasi	1.769.097.527.672	1.628.065.368.709	92.03
Belanja Modal	603.807.241.490	524.332.531.767	86.84
Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000	283.031.800	9.43

Uraian Pembiayaan	Anggaran	Realisasi	%
Penerimaan Pembiayaan	273.677.946.891	264.969.086.841	96.82
Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000	1.000.000.000	100.00

Sumber: Pemko Batam (Data Diolah 2017)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa kinerja pada SKPD masih belum optimal, terbukti dalam penetapan anggaran masih sering terjadi selisih lebih dan selisih kurang antara anggaran yang ditetapkan dengan anggaran sesungguhnya. Dicermati dari tabel, laporan realisasi anggaran APBD tahun 2014-2015, menunjukkan bahwa anggaran yang ditetapkan lebih dari 100% terealisasikan, berdasarkan data tersebut terlihat anggaran diestimasi dengan sengaja agar jumlah yang tertera lebih tinggi atau bahkan lebih kurang dari yang seharusnya, dan pada pendapatan sepertinya dengan sengaja ditetapkan agar lebih kecil dari pada hasil pencapaiannya. Tabel 1.1 terlihat bahwa sebenarnya mereka mampu untuk mendapatkan pencapaian pendapatan yang lebih dari target yang mereka tetapkan, tapi agar kinerja terlihat baik mereka mengecilkan target pendapatan mereka,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga dengan mudah untuk dicapai, yang hal seperti ini dapat menimbulkan senjangan anggaran.

Selain itu dilihat dari data tersebut dapat diketahui estimasi anggaran ditahun berikutnya tidak memperhatikan realisasi anggaran ditahun sebelumnya, hal ini terlihat dari rencana yang telah ditetapkan bahwa realisasi anggaran yang dialokasikan cenderung mengalami peningkatan tetapi secara presentasi realisasinya cenderung tidak stabil dari tahun 2014-2015. Hal ini menunjukkan bahwa belum seluruhnya realisasi anggaran dapat terserap oleh alokasi belanja rutin maupun belanja pembangunan yang mengakibatkan sisa lebih anggaran pada setiap tahun anggaran.

Falikhatun (2007) menyatakan tiga alasan utama manajer melakukan *budgetary slack*, yaitu: (1) orang-orang selalu percaya bahwa hasil pekerjaan mereka akan terlihat bagus dimata atasan jika mereka dapat mencapai anggarannya, (2) *budgetary slack* selalu digunakan untuk mengatasi kondisi tidak pasti, dan (3) rencana anggaran selalu dipotong dalam proses pengalokasian sumber daya. Penelitian mengenai *budgetary slack* telah dilakukan seperti penelitian Lutuheru (2005) yang menunjukkan partisipasi penyusunan anggaran dapat mengurangi kesenjangan anggaran.

Banyak hal yang mempengaruhi terjadinya kesenjangan anggaran (*budgetary slack*). Peneliti dalam penelitian ini menggunakan partisipasi anggaran dan kejelasan sasaran anggaran. Menurut Bonardi dan Rangga (2006:5) menyatakan bahwa partisipasi anggaran sebagai proses dimana bawahan dan pelaksana anggaran diberikan kesempatan untuk terlibat dan mempunyai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

pengaruh dalam proses penyusunan anggaran. Kesempatan yang diberikan diyakini meningkatkan pengendalian dan rasa keterlibatan dikalangan bawahan dan pelaksana anggaran.

Menurut Latuheru (2005) menunjukkan bahwa komitmen organisasi dengan partisipasi anggaran akan menurunkan kecendrungan manajer dalam menciptakan senjangan anggaran. Karena disebabkan manejer yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi memiliki dorongan dari dalam dirinya untuk berbuat sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi.

Kemudian Menurut Kartika (2010) menunjukkan bahwa peningkatan kecendrungan untuk menciptakan senjangan anggaran sejalan dengan peningkatan tingkat partisipasi menunjukan suatu perilaku disfungsional dari penggunaan anggaran partisipasif. Kecendrungan peningkatan adanya timbulnya perilaku disfungsional dalam partisipasi anggaran yang tinggi menimbulkan dugaan akan adanya kesalahan dalam sistem penilaian kinerja atau mungkin sistem tersebut tidak sesuai untuk diterapkan karena penilaian kinerja yang berdasarkan pada pencapaian target anggaran memungkinkan bawahan menghindari penilaian buruk atas kinerja dengan memasukkan senjangan pada anggaran yang disusunnya. Kartika (2010) komitmen organisasi tidak memilki pengaruh yang signifikan terhadap hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan senjangan anggaran, dalam hasil penelitian nya individu yang memiliki komitmen tinggi akan lebih mengutamakan kepentingan organsasinya dibandingkan dengan kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Sedangkan menurut Supomo (2003) dalam Kartika (2010) yang menguji pengaruh partisipasi anggaran dan keterlibatan kerja terhadap senjangan anggaran dengan komitmen organisasi sebagai variable moderating, hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan pada interaksi antara komitmen organisasi dengan partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran. Dan terdapat pengaruh yang signifikan pada interaksi antara komitmen organisasi dengan keterlibatan kerja terhadap senjangan anggaran. Secara keseluruhan penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen puncak mampu menurunkan kecendrungan menejer untuk menciptakan senjangan anggaran dengan penekanan pada komitmen organisasi pada menejer.

Kemudian menurut Anthony dan Govindaradjaran (2007:270) bahwa asimetri informasi adalah suatu kondisi apabila atasan tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai kinerja bawahan baik itu dalam kinerja aktual, motivasi dan tujuan, sehingga atasan tidak dapat menentukan kontribusi bawahan terhadap hasil aktual perushaaan atau organisasi. Dengan terdapat asimetri informasi dan perbedaan tujuan antara atasan dengan bawahan maka bawahan dapat mengambil kesempatan dari partisipasi penganggaran dan memberikan informasi yang bias dari informasi pribadi mereka dengan memuat anggaran yang relative lebih mudah dicapai, sehingga terjadilah senjangan anggaran, yaitu melaporkan anggaram dibawah kinerja yang diharapkan.

Pada konteks pemerintah daerah, aparat yang merasa sasaran anggarannya jelas, akan lebih bertanggung jawab jika didukung dengan komitmen aparat yang tinggi terhadap organisasi pemerintah daerah. Hal ini akan mendorong aparat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang dicapai oleh organisasi sehingga akan mengurangi senjangan anggaran. Manejer yang memiliki tingkat komitmen organisasi yang tinggi akan memiliki pandangan positif dan berusaha berbuat yang terbaik demi kepentingan organisasi. Komitmen organisasi yang tinggi tidak akan menimbulkan senjangan anggaran (Restu Agusti: 2013). Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2009) menunjukkan hasil komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dengan senjangan anggaran.

Asimetri informasi dapat digunakan oleh bawahan untuk menyembunyikan informasi mengenai kinerjanya, yang mengakibatkan kurangnya informasi yang mengakibatkan kurangnya motivasi untuk meningkatkan hasil karena ketidak mampuannya dapat ditutupi oleh asimetri informasi (De Faria dan Silvia 2013). Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Restu Agusti (2013) menunjukkan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap hubungan antaran kejelasan sasaran anggaran terhadap senjangan anggaran. Sedangkan penelitian oleh Kridawan dan Mahmud (2014) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu Asimetri Informasi tidak berpengaruh terhadap hubungan antara kejelasan sasaran anggaran terhadap senjangan anggaran.

Mengingat pentingnya anggaran bagi suatu organisasi dan kerugian yang diakibatkan oleh senjangan anggaran, maka hubungan senjangan anggaran antara variabel-variabel lain, khususnya variabel yang dapat memperkuat dan memperlemah adanya senjangan anggaran perlu diteliti. Maka berdasarkan dari latar belakang diatas dan berdasarkan kasus yang terdapat pada SKPD tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka peneliti ingin melakukan penelitian ini dengan mengambil judul **"Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Senjangan Anggaran dengan Komitmen Organisasi dan Asimetri Informasi sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Batam)".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka peneliti dapat merumuskan beberapa masalah yaitu:

1. Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap senjangan anggaran pada SKPD Kota Batam?
2. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap senjangan anggaran pada SKPD Kota Batam?
3. Apakah komitmen organisasi memoderasi Hubungan partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap senjangan anggaran pada SKPD Kota Batam?
4. Apakah Komitmen Organisasi Memoderasi Hubungan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Senjangan Anggaran pada SKPD Kota Batam?
5. Apakah Asimetri Informasi Memoderasi Hubungan Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap senjangan anggaran pada SKPD Kota Batam?
6. Apakah Asimetri Informasi Memoderasi Hubungan Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap senjangan anggaran pada SKPD Kota Batam?

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk Mengetahui Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap senjangan anggaran pada SKPD Kota Batam.
2. Untuk Mengetahui Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap senjangan anggaran pada SKPD KotaBatam.
3. Untuk Mengetahui Apakah komitmen organisasi dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap senjangan anggaran pada SKPD Kota Batam.
4. Untuk Mengetahui Apakah komitmen organisasi dapat memperkuat atau memperlemah kejelasan sasaran anggaran terhadap senjangan anggaran pada SKPD Kota Batam.
5. Untuk Mengetahui Apakah Asimetri Informasi dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap senjangan anggaran pada SKPD Kota Batam.
6. Untuk Mengetahui Apakah Asimetri Informasi dapat meperkuat atau meperlemah pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap senjangan anggaran pada SKPD Kota Batam.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa diperolah dari penelitian ini adalah :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan tambahan penjelasan dan ilmu pengetahuan dalam mata kuliah penganggaran, yaitu yang berkaitan dalam masalah pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap senjangan.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan memperluas pengetahuan serta wawasan mengenai pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap senjangan anggaran pada satuan perangkat kerja pemerintah, serta komitmen Organisasi dan asimetri informasi sebagai variabel moderasinya.

2. Bagi Akademis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi akademisi dalam mengembangkan pengetahuan di bidang Akuntansi Pemerintahan khususnya mengenai pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap senjangan anggaran dengan komitmen organisasi sebagai dan asimetri informasi sebagain variabel moderating.

3. Bagi Pemerintah

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah Kota Batam didalam membuat kebijakan serta menentukan arah dan strategi didalam perbaikan kinerja pemerintah daerah dimasa yang akan datang pada pemerintah daerah Kota Batam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai bagian-bagian yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan secara singkat isi masing-masing bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas mengenai kajian teori dan penelitian terdahulu, kerangka penelitian yang merupakan konsep yang mendasari pemikiran peneliti dalam mengadakan penelitian dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data yang akan digunakan, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, serta metode analisis data.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang karakteristik responden, analisis data dan uji kualitas data serta pembahasan dari hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian yang berisikan tentang kesimpulan, dan saran-saran dari penulis.

DAFTAR PUSTAKA